

Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal

Yolanda Angelita Desya¹, Madris², Muhammad Yusri Zamhuri³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
yolandaang1212@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
madriskandar@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
mzamhuri@yahoo.com

*E-mail Korespondensi: yolandaang1212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2010-2021. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita. Investasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, PDRB Per Kapita, Kualitas Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government spending and investment on the quality of human resources, both directly and indirectly through per capita GRDP in West Sulawesi. This type of research is quantitative using secondary data from the Central Bureau of Statistics for 2010-2021. The analysis model used is multiple linear regression analysis with the help of the Eviews 10 program. The results of this study indicate that government spending has a direct positive effect on the quality of human resources. Meanwhile, government spending does not directly affect the quality of human resources through GRDP per capita. Investment directly negatively affects the quality of human resources. Meanwhile, investment indirectly has a positive effect on the quality of human resources through GRDP per capita.

Keywords: Government Expenditure, Investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita, Human Resource Quality, Economic Growth

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset fundamental bagi pembangunan suatu negara. Penting untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (Pulubuhu & Alhaqqi, 2019). Pembangunan manusia mempunyai tujuan utama yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Kondisi makroekonomi Indonesia, yang berdampak pada kualitas hidup dan sumber daya manusia (Akhmad et al., 2019). Sehingga mencerminkan tantangan dalam peningkatan kualitas layanan yang berpengaruh pada sumber daya manusia (Karim & Tajibu, 2021). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan" (Saidy et al., 2024). Penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di negara berkembang (Fahmid et al., 2020). Masalah sosial ekonomi dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut (Ady, 2015). Dinamika ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (Astaman et al., 2020). Namun dinamika ekonomi juga dapat berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia (Fitrianti & Siswadharna, 2021). Berdasarkan riset sebelumnya juga menemukan menunjukkan dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masyarakat (Mustafa et al., 2019). Menunjukkan adaptasi masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas hidup (Karim et al., 2021). Hal ini sesuai bahwa mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kualitas hidup dan sumber daya manusia (Sirajuddin et al., 2022). Penting untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia (Karim et al., 2023). Penting untuk dijadikan perhatian dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia (Reviane, 2017). Sehingga sangat penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia melalui lingkungan yang sehat (Paddu et al., 2024).

Untuk memaksimalkan pembangunan, Indonesia membutuhkan masyarakat yang unggul dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Menggambarkan adaptasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat (Karim et al., 2021). Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Motivasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Mangilep & Agung, 2015). hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (Mangilep & Naim, 2021). Adapun kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari komponen pembangunan manusia

yang dianggap menjadi dasar yaitu dimensi tersebut adalah: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (*decent standard of living*) (1). Berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat adalah hal yang ingin dicapai (Seniwati et al., 2024). Sehingga hal ini dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup (Rumpa et al., 2023). Meningkatkan keberlanjutan ekonomi lokal, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Syahid, 2023). Melalui pencapaian keberlanjutan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia" (Wahyudi et al., 2022). Meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia merata hingga di daerah (Nursini, 2019).

United Nation Development Programme (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Sampai dengan tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah; Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode penghitungan dan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik (2). Indikator pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat lahir. AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Indikator kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Selanjutnya, dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (3). Indeks Pembangunan Manusia, yang berperan penting dalam mengurangi ketimpangan regional (Alfons & Abd Rahman, 2024)

United Nations Development Program (UNDP) juga memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Kemajuan IPM menggambarkan intensitas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), rendah ($IPM < 60$) (1).

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,
Pulau Sulawesi dan Indonesia Tahun 2020-2021 (persen)

Tahun	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Indonesia
2010	59.74	66.00	64.25	66.53
2011	60.63	66.65	64.98	67.09
2012	61.01	67.26	65.59	67.70
2013	61.53	67.92	66.16	68.31
2014	62.24	68.49	66.73	68.90
2015	62.96	69.15	67.31	69.55
2016	63.60	69.76	67.91	70.18
2017	64.30	70.34	68.55	70.81
2018	65.10	70.90	69.23	71.39
2019	65.73	71.66	69.93	71.92
2020	66.11	71.93	70.11	71.94
2021	66.36	72.24	70.39	72.29

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2022

Tabel 1 di atas menjelaskan dalam dua belas tahun terakhir perbandingan perkembangan IPM Sulawesi Barat dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, dan Indonesia yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kesejahteraan merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat jasa dalam membantu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dengan persentase yang baik menunjukkan bahwa dalam daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Namun, jika dibandingkan dengan dengan rata-rata nasional dalam dua belas tahun terakhir, IPM Sulawesi Barat masih tertinggal, terlihat dari data diatas dari tahun 2010 hingga 2021 belum pernah menyentuh rata-rata baik Sulawesi Selatan, regional maupun nasional. IPM Sulawesi Barat hanya berada diposisi IPM sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$). Pada tahun 2010 sebesar 59.74 persen sedangkan IPM Sulawesi Selatan 66.00 persen, IPM regional sebesar 64.25 persen dan IPM nasional sebesar 66.53 persen. Hingga pada tahun 2021 rata-rata IPM Sulawesi Barat terus meningkat namun hanya mampu mencapai 65.52 persen sedangkan rata-rata IPM Sulawesi Selatan telah mencapai 72.24 persen, IPM regional sebesar 70.39 persen dan rata-rata nasional sebesar 72.29 persen.

Faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan suatu bangsa adalah modal manusia, sumber daya alam hanyalah raw material yang sifatnya pasif sehingga tidak dapat menentukan kecepatan dalam pembangunan negara (4). Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat memiliki pembangunan manusia yang belum mampu mendorong kecepatan pembangunan daerah. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut (Mangilep et al., 2019). Hal ini berarti, pengeluaran pemerintah turut mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia. Sehingga dapat memengaruhi akses dan kualitas layanan publik yang diberikan (Qalbi et al., 2020). Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi investasi domestik swasta, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (Fitrianti et al., 2015). Kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan pada kualitas sumber daya manusia (Aziza et al., 2020). Sangat penting untuk memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat yang dapat mendorong kualitas hidup (Saru et al., 2023). Mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Nursini, 2020). Mempengaruhi kualitas hidup dan sumber daya manusia melalui kebijakan yang berkelanjutan (Paddu et al., 2024).

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan, pada gilirannya, kualitas sumber daya

manusia (Wati et al., 2024). Penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia melalui lingkungan yang sehat" (Padu et al., 2024). Riset sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat berpengaruh besar terhadap potensi pengembangan sumber daya manusia (Zulkifli et al., 2024). Selain dari Kesehatan pendidikan juga sangat mempengaruhi sesuai riset yang dilakukan sebelumnya oleh (Syamsudin et al., 2024) pendidikan tinggi di Indonesia berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Inklusi keuangan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Anwar et al., 2022). Menstabilkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas hidup (Anwar et al., 2020). Pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Indraswat, 2017). Meningkatkan infrastruktur energi, yang penting untuk pengembangan kualitas hidup dan sumber daya manusia (Padu et al., 2024). Energi terbarukan di Indonesia sangat penting untuk mencapai netralitas karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Saudi et al., 2024). Maka pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup (Caroline et al., 2021).

Mendukung pembangunan berkelanjutan, yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Fitrianti & Siswadharna, 2021). Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor (Syahid & Syahwiah, 2021). Berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia (Caroline et al., 2021). Berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat (Reviane et al., 2024). Berdampak pada pengurangan ketimpangan regional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Padu, 2017). Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan regional di Indonesia (Soedarmono, 2023). Pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah pedesaan (Razak et al., 2023). Perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (Iswandi & Yunus, 2020). Dapat meningkatkan produktivitas, yang berkontribusi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (Anwar et al., 2020). Pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Yunus et al., 2024).

Pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu

indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita disuatu wilayah. Pengurangan ketimpangan, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Anwar & Mangilep, 2019). PDRB per kapita juga memiliki peran penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, karena dari pendapatan yang di terima oleh seseorang dapat membiayai sekolah agar memiliki pendidikan yang baik yang dapat mendorong tingkat kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan dasar agar tidak mengalami penyakit seperti gizi buruk dan dari hal ini akan secara otomatis akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kesehatan masyarakat dan, pada gilirannya, kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut (Sirajuddin et al., 2024). Sehingga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi (Yunus et al., 2024). Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia" (Yuliany & Nursini, 2022). Mengurangi ketimpangan ekonomi regional berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tamberan et al., 2020). Dalam 10 tahun terakhir peningkatan dari variabel pengeluaran pemerintah, investasi, dan PDRB per kapita menunjukkan tren positif, meskipun terlihat beberapa kali menunjukkan angka penurunan. wawasan tentang efisiensi investasi, penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (Mangilep et al., 2019). Namun demikian, peningkatan variabel tersebut tidak beriringan dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Tabel 2
PDRB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)	Investasi (Miliar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Rupiah)
2010	607.67	4548.89	14,792,594
2011	731.37	5223.61	16,977,203
2012	868.13	5599.7	18,576,447
2013	1043.99	6253.9	20,457,334
2014	1227.42	6726.59	23,415,055
2015	1385.84	7182.86	25,727,706
2016	2152.02	7984.37	27,513,056
2017	1927.38	8617.01	29,675,856
2018	1746.62	9082.97	32,059,093
2019	2006.03	9630.54	33,592,167
2020	1989.56	8810.67	32,713,242
2021	1986.34	9465.98	35,036,023

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat diolah, 2022

Tabel 2 di atas menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita Sulawesi Barat dapat dilihat dari PDRB perkapita yang cenderung meningkat dalam dua belas tahun terakhir. Pada tahun 2010 menunjukkan sebesar 14,792,594 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 33,592,167 rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020 menurun menjadi 32,713,242 rupiah dan kembali meningkat sebesar 35,036,023 rupiah pada tahun 2021.

Peran Investasi yang diukur menggunakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap kepentingan pelaku bisnis dan penyusunan kebijakan pemerintah cukup penting, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akan meningkatkan penambahan lapangan pekerjaan baru yang terjadi akibat tingginya kebutuhan pihak swasta pada tenaga kerja dan berimbas pada naiknya PDRB yang meningkatkan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia" (Wardihan et al., 2021). Tabel 2 menunjukkan investasi yang cukup baik terjadi peningkatan dalam dua belas tahun terakhir. Pada tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2010 menunjukkan investasi sebesar 4.548,89 miliar rupiah. Kemudian, terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 9.630,54 miliar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8.810,67 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9.465,98 miliar rupiah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas di era otonomi saat ini wajib mampu memberdayakan alokasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam dua belas tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 607,67 miliar rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 2.152,02 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2017 menurun menjadi 1.927,38 miliar rupiah hingga tahun 2018 menjadi 1.746,62 miliar rupiah. Terjadi peningkatan kembali tahun 2019 sebesar 2.006,03 miliar rupiah hingga tahun 2021 hanya mencapai 1.986,34 miliar rupiah (5).

Dalam era otonomi saat ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilkan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan

yang besar dalam hal ini dan harus memanfaatkan alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun, fenomena yang terjadi di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa tidak semua daerah dengan belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi pula.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal”.

METODOLOGI KAJIAN

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki lima kabupaten dan satu kota, di antaranya adalah Mamuju sebagai ibu kota, disusul Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Mamuju, BPS Kabupaten Polewali Mandar, BPS Kabupaten Mamasa, BPS Kabupaten Majene, BPS Kabupaten Pasangkayu, BPS Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun data yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah (Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota), Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PDRB Per Kapita dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat selama tahun 2010-2021.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Barat. Data yang sudah ada tersebut dilengkapi dengan dengan studi kepustakaan dari berbagai dokumen, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

$$Y_1 = f(X_1, X_2)$$

$$e^{Y_1} = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} e^{\mu_1}$$

$$Y_1 = \ln\alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1 \text{ (1)}$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1)$$

$$e^{Y_2} = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} e^{\beta_3 Y_1 + \mu_2}$$
$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 Y_1 + \mu_2 \quad \text{-----(2)}$$

Persamaan Y_1 disubstitusi ke persamaan Y_2

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1) + \mu_2$$
$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \ln \alpha_0 \beta_3 + \alpha_1 \beta_3 \ln X_1 + \alpha_2 \beta_3 \ln X_2 + \beta_3 \mu_1 + \mu_2$$
$$Y_2 = \ln \beta_0 + \ln \alpha_0 \beta_3 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \alpha_1 \beta_3 \ln X_1 + \alpha_2 \beta_3 \ln X_2 + \beta_3 \mu_1 + \mu_2$$

Dimana:

- Y_1 : PDRB Per Kapita (rupiah)
- Y_2 : Kualitas Sumber Daya Manusia (persen)
- X_1 : Pengeluaran Pemerintah (rupiah)
- X_2 : Investasi (rupiah)
- α_1 : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Per Kapita
- α_2 : Pengaruh Investasi terhadap PDRB Per Kapita
- β_1 : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
- β_2 : Pengaruh Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
- β_3 : Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
- $\alpha_1 \beta_3$: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia melalui PDRB Per Kapita
- $\alpha_2 \beta_3$: Pengaruh Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia melalui PDRB Per Kapita
- μ_1 : Error term 1
- μ_2 : Error term 2

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pandemi COVID-19 yang sempat melanda di tahun 2020 dan 2021 terlihat memberikan kontraksi terhadap perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Tahun 2021, nilai indeks pembangunan manusia hanya bertumbuh menjadi 66.36 persen dari 66.11 persen atau bertumbuh sebesar 0.25 persen. Komponen pembangun indeks pembangunan manusia, yakni pendidikan (rata-rata lama sekolah & harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), dan ekonomi (pengeluaran per kapita) menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 menuju 2021, dan pembangunan manusia Sulawesi Barat masih berstatus “sedang”, dan masih sama sejak tahun 2011. Komponen pengeluaran per kapita menunjukkan sedikit penurunan menjadi dari 9,168 ribu rupiah menjadi 9,153 ribu rupiah atau

turun sekitar -15 ribu rupiah. Sedangkan komponen lainnya menunjukkan peningkatan, seperti rata-rata lama sekolah yang naik dari 7.89 tahun menjadi 7.96 tahun pada tahun 2021 atau naik sebesar 0.07 tahun, harapan lama sekolah yang naik sebesar 0.09 persen menjadi 12.86 persen pada 2021 dan angka harapan hidup yang meningkat menjadi 65.25 tahun atau naik sebesar 0.19 tahun.

Pengeluaran pemerintah di provinsi Sulawesi Barat 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebelum pandemi COVID-19 melanda (2017-2019), tren dari pengeluaran pemerintah fluktuatif. Pada tahun 2017, realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 1,927.38 miliar rupiah. Realisasi tahun 2018, menurun menjadi 1,746.62 miliar rupiah atau turun sebesar 180.76 miliar rupiah. Selanjutnya, tahun 2019 realisasi tersebut naik menjadi 2,006.03 miliar rupiah atau naik sebesar 259.41 miliar rupiah. Pada masa pandemi COVID-19, realisasi pengeluaran pemerintah cukup menurun, namun tidak menunjukkan penurunan tajam, yakni hanya 17 miliar rupiah. Pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan sektor riil, menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah daerah. Karena, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pemerintah disaat terjadi penurunan pendapatan daerah. Selanjutnya, tahun 2021 realisasi pengeluaran pemerintah juga tidak menunjukkan penurunan yang tajam. Pengeluaran pemerintah hanya menurun menjadi 1,986.34 miliar rupiah atau menurun sebesar 3.22 miliar rupiah.

Perkembangan aliran investasi di Sulawesi Barat dalam 5 tahun terakhir, berjalan dengan cukup baik. Sepanjang tahun 2017-2019, tren investasi menunjukkan tren yang positif dan angka tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan total 9,630.54 miliar rupiah. Namun, kehadiran pandemi COVID-19 memberikan kontraksi yang cukup signifikan terhadap penurunan aliran investasi di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020, aliran investasi tercatat sebesar 8,810.67 miliar rupiah atau turun sebesar 819.87 miliar rupiah. Penurunan ini cukup tajam, karena kontraksi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berkontraksi terhadap aktivitas perekonomian. Seiring dengan perbaikan di tahun 2021 akan pandemi COVID-19, nilai aliran investasi kembali naik ke angka normal yakni 9.465.98 miliar rupiah atau naik sebesar 655.31 miliar rupiah. Perolehan ini naik cukup tajam, bahkan menjadi perolehan tertinggi kedua selama 5 tahun terakhir di Sulawesi Barat.

B. Hasil Estimasi

Hasil estimasi pada penelitian ini diolah menggunakan *software* Eviews 10. Berikut adalah hasil estimasi dari penelitian ini.

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap PDRB Per Kapita

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.
Konstanta	10.38904	2.015218	5.155294	0.0000
Pengeluaran Pemerintah (X1)	-0.016482	0.116626	-0.141323	0.8881
Investasi (X2)	0.499311	0.067630	7.382984	0.0000
R-squared	0.543685			
Adjusted R-squared	0.529644			
F-statistik	38.72267			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber : Data diolah

Diperoleh persamaan regresi dengan substitusi nilai koefisien pada persamaan berikut:

$$e^{Y_1} = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} e^{\mu_1}$$

$$e^{Y_1} = 32501,45 X_1^{0,983653} X_2^{1,647585} e^{\mu_1}$$

$$Y_1 = \ln\alpha_0 + \ln X_1 + \ln X_2 + \mu_1$$

$$Y_1 = 10.38 - 0.016 \ln X_1 + 0.49 \ln X_2$$

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.
Konstanta	-47.30422	10.25228	-4.614018	0.0000
Pengeluaran Pemerintah (X1)	2.497934	0.499948	4.996390	0.0000
Investasi (X2)	-2.742877	0.393046	-6.978514	0.0000
PDRB Per Kapita (Y1)	5.788627	0.531625	10.88856	0.0000
R-squared	0.709642			
Adjusted R-squared	0.696031			
F-statistik	52.13916			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber : Data diolah

Diperoleh persamaan regresi dengan substitusi nilai koefisien pada persamaan berikut:

$$e^{Y_2} = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} e^{\beta_3 Y_1} + \mu_2$$

$$e^{Y_2} = 2.857842 X_1^{12.157350} X_2^{0,064384} e^{326.564343 Y_1} + \mu_2$$

$$Y_2 = \ln\beta_0 + \ln X_1 + \ln X_2 + \ln Y_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = -47.30 + +2.49 \ln X_1 - 2.74 \ln X_2 + 5.78 \ln Y_1$$

Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui PDRB Per Kapita

Variabel	Koefisien				Pengaruh Tidak Langsung ($\alpha \cdot \beta_3$)
	α_0	α_1	α_2	β_3	
Pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1	-	-0.016482	-	5.788627	-0.095408
Pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1	-	-	0.499311*	5.788627	2.890325
Pengaruh Y1 terhadap Y2	5.788627*	-	-	-	-

Sumber : Data diolah

Pembahasan

Pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif ditunjukkan pada nilai koefisien β_1 yaitu sebesar 2.497934. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan angka kualitas sumber daya manusia sebesar 2.497934 persen di Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh (6) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja yang tepat dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum, serta meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Belanja langsung dan tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan ini, di mana belanja langsung lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk mendukung kinerja unit kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan dan alokasi belanja daerah yang tepat sangat penting untuk memajukan pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indikator kinerja yang baik akan menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan ini dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini berarti, pengeluaran pemerintah turut mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia.

Pengaruh secara tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita tidak berpengaruh ditunjukkan pada nilai koefisien $\alpha_1 \cdot \beta_3$ sebesar -0,095408. Tidak berpengaruhnya variabel pengeluaran pemerintah dalam model penelitian ini, disebabkan oleh alokasi belanja pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD tidak teralokasikan ke pembiayaan yang bersifat produktif dan urgent. Sehingga, alokasi pengeluaran pemerintah tidak terdistribusikan secara efektif dan efisien ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak mampu membawa stabilisasi dalam sebuah perekonomian. Selain itu, jika terdapat pemborosan dalam tata kelola pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan distorsi dari tujuan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah tidak optimal dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kenaikan kualitas sumber daya manusia yang tercerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Jadi, nilai kualitas sumber daya manusia yang stagnan atau bahkan menunjukkan penurunan sangat mungkin terjadi apabila alokasi pengeluaran pemerintah tidak tepat sasaran, efektif, dan efisien. Karena pengeluaran pemerintah tidak mampu memancing kenaikan dari pendapatan per kapita itu sendiri.

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung investasi berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, untuk pengaruh secara tidak langsung investasi berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita.

Pengaruh secara langsung investasi terhadap kualitas sumber daya manusia yaitu berpengaruh negatif ditunjukkan pada nilai koefisien β_2 yaitu sebesar -2.742877. Hal ini berarti bahwa investasi sebesar satu persen akan menurunkan angka kualitas sumber daya manusia sebesar 2.742877 persen di Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan (7) menemukan melalui penelitian empiris bahwa investasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap IPM karena investasi yang digunakan dalam studi tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk investasi dalam modal manusia. Oleh karena itu, modal yang diinvestasikan tidak berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan IPM dalam tahun yang sama. Namun, di sisi lain, investasi tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Studi lain oleh (8) juga menunjukkan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data yang digunakan dalam variabel investasi meliputi investasi keseluruhan yang tergabung dalam PDRB Pengeluaran, termasuk investasi fisik secara keseluruhan dan bukan hanya investasi di

bidang sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan indikator dalam IPM.

Pengaruh secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung investasi terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita berpengaruh positif ditunjukkan pada nilai koefisien $\alpha_2 \cdot \beta_3$ sebesar 2.890325. Artinya, secara tidak langsung investasi sebesar satu persen akan menaikkan kualitas sumber daya manusia sebesar 2.890325 persen di Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian (7) investasi tidak dapat mempengaruhi IPM secara langsung pada tahun yang sama melainkan membutuhkan waktu melalui peningkatan pendapatan perkapita kembali atas investasi tersebut dalam proses pertumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya. Karena PMTB yang tepat sasaran dan efektif dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan ini, maka kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan IPM dapat meningkat.

PDRB per kapita berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kualitas sumber daya manusia sebesar 5.788627. Hal ini sejalan dengan (9) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita. Kemudian, (10) juga menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat bisa mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan mendorong terjadinya peningkatan daya beli sehingga dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.

Hubungan antara PDRB per kapita dan IPM erat karena semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, semakin besar kemungkinan untuk memiliki IPM yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi dapat memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, PDRB per kapita yang lebih tinggi cenderung berdampak positif pada peningkatan IPM suatu wilayah. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita dapat menjadi fokus strategi pembangunan untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 2 hal yang dapat disimpulkan, yakni pengaruh langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya

manusia, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Sedangkan, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita, dalam penelitian tidak berpengaruh, disebabkan oleh alokasi belanja pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD tidak teralokasikan ke pembiayaan yang bersifat produktif dan urgent.

Pengaruh langsung investasi berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, karena investasi yang digunakan dalam studi tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk investasi dalam modal manusia. Oleh karena itu, modal yang diinvestasikan tidak berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan IPM dalam tahun yang sama. Sedangkan, investasi secara tidak langsung berpengaruh positif melalui PDRB per kapita, artinya investasi tidak dapat mempengaruhi IPM secara langsung pada tahun yang sama melainkan memerlukan waktu melalui peningkatan pendapatan perkapita kembali atas investasi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat

Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada pemerintah agar mengalokasikan untuk hal-hal yang strategis, produktif, dan *urgent*. Karena alokasi yang tepat sasaran dapat memancing distribusi yang baik dan stabilisasi dalam perekonomian. Sehingga perlahan-lahan, pendapatan rata-rata masyarakat dapat meningkat yang kemudian akan memancing perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, investasi harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat prioritas dan produktif seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang akan memancing perekonomian wilayah. Pada akhirnya investasi yang diarahkan pada prioritas dan sarana produktif akan mempermudah akses masyarakat setempat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara rata-rata.

REFERENSI

1. BPS. Indeks Pembangunan Manusia [Internet]. 2023. Available from: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
2. UNDP. Human Development Report. 1990.
3. BPS. Indeks Pembangunan Manusia [Internet]. 2021. Available from: [file:///C:/Users/Yola Desya/Downloads/Jurnal/Indeks Pembangunan Manusia 2021.pdf](file:///C:/Users/Yola%20Desya/Downloads/Jurnal/Indeks%20Pembangunan%20Manusia%202021.pdf)
4. Todaro MP, Smith SC. Economic Development. Pearson; 2010. 829 p.

5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. APBD [Internet]. 2023. Available from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
6. Sasana H. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekon dan Manaj* [Internet]. 2012;25(1):1–12. Available from: [file:///C:/Users/Yola Desya/Downloads/183-847-1-PB.pdf](file:///C:/Users/Yola%20Desya/Downloads/183-847-1-PB.pdf)
7. Lubis AZA. Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara ASEAN-4). *J Ilm*. 2013;
8. Noviansyah H, Rosyadi, Yacoub Y. Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. *J Ekon Drh* [Internet]. 2019;7(1):1–23. Available from: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28580>
9. Ezkirianto R, Alexandi MF. Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pdrb Per Kapita Di Indonesia. *J Ekon Dan Kebijak Pembang*. 2018;2(1):14–29.
10. Amrullah R. Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *J Ilmu Ekon JIE*. 2022;6(1):90–8.
11. Pulubuhu, D. A. T., & Alhaqqi, M. S. (2019, October). Planned behaviour theory for the science agency: the role of youth for sustainable waste management. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012101). IOP Publishing.
12. AKHMAD, A., Romadhoni, B., Karim, K., Tajibu, M. J., & Syukur, M. (2019). The impact of fuel oil price fluctuations on Indonesia's macro economic condition. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 277-282.
13. Karim, K., Tajibu, M. J., Fitrianti, R., Reviane, I. T. A., & Nurbayani, S. U. (2021). Consumer behavior in using prepaid electricity systems in the covid-19 pandemic period in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(5), 172-177.
14. SAIDY, E. N., Muhammad, A. M. R. I., FATTAH, S., & NURBAYANI, S. U. (2024). Determinants of Bank Credit Distribution in Supporting Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *Journal of Distribution Science*, 22(8), 17-27.
15. Fahmid, I. M., Harun, H., Graham, P., Carter, D., Suhab, S., An, Y., ... & Fahmid, M. M. (2020). New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries. *Public Money & Management*, 40(2), 160-163.

16. Ady, M. M. A. (2015). Socioeconomic Problems on Adoption of New Technologies for Production of Paddy Rice by Farmers in Upland Areas of South Sulawesi. 千葉大学人文社会科学研究, 30, 150-157.
17. Astaman, P., Siregar, A. R., & Nurbayani, S. U. (2020, March). Analysis effect the price of the demand for chicken eggs in Biringkanaya district. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 473, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.
18. Fitrianti, R., & Siswadharna, B. (2021). THE DETERMINANTS OF CONSUMPTION EXPENDITURE OF FEMALE WORKER IN INFORMAL SECTOR IN MAKASSAR. Academy of Strategic Management Journal, 20, 1-8.
19. Mustafa, A. E., Arman, A., & Saudi, N. S. (2019, March). Social status relationship to purchase of tedong bonga for the Community Toraja Tribes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 247, No. 1, p. 012060). IOP Publishing.
20. Karim, K., Tajibu, M. J., Fitrianti, R., Reviane, I. T. A., & Nurbayani, S. U. (2021). Consumer behavior in using prepaid electricity systems in the covid-19 pandemic period in Makassar City, Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(5), 172-177.
21. Sirajuddin, S. N., Amrawaty, A., Nurlaelah, S., & Saudi, N. D. S. Community Perception of Waste Pollution from Bolu Animal Market in Indonesia. Environment and Ecology Research 10 (6): 749-754, 2022.
22. Karim, K., Ilyas, G. B., Umar, Z. A., Tajibu, M. J., & Junaidi, J. (2023). Consumers' awareness and loyalty in Indonesia banking sector: does emotional bonding effect matters?. Journal of Islamic Marketing, 14(10), 2668-2686.
23. REVIANE, I. T. A. (2017). The mediating effect of inflation on the effect of tradeliberalization and government spending towards welfare. Journal of Applied Economic Sciences (JAES), 12(50), 1038-1047.
24. Paddu, A. H., Reviane, I. T. A., Saudi, N. D. S., Djam'an, F., Zaenal, M., & Sabbar, S. D. (2024). Interlinkages of fiscal decentralization, financial development, and carbon emissions: the underlying significance of natural resources. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(4), 377-390.
25. Karim, K., & Tajibu, M. J. (2021). Determination of consumer switching barriers to use prepaid electricity systems in the household sector in makassar, indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(1), 193-199.
26. MANGILEP, M., & Agung, A. (2015). Findings in Interviews on Motivation of Farmers

- for the Improvement of Paddy Rice Quality and the Implementation of New Methods of Paddy Rice Production in the Chiba Prefecture. *千葉大学人文社会科学研究*, 31, 116-123.
27. Mangilep, M. A. A., & Naim, N. (2021, November). Is the Foreign Investment Matter for the Agricultural Export?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 921, No. 1, p. 012037). IOP Publishing.
 28. Seniwati, A., Amri, K., Mangilep, M. A. A., Tahir, Z., & Ranti, M. A. (2024). Handling security and terrorism issues in developing the tourism sector through ecotourism policies on small islands in Makassar City, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14).
 29. Rumpa, S., Yunus, R., Mangilep, M. A. A., & Wahida, W. N. (2023). Community Preferences on the Development of Waste Bank in Makassar City. *Hasanuddin Review on Sustainable Development*, 1(1).
 30. Syahid, M. (2023, September). Development of strategic plan for palm sugar agro-industry using SWOT analysis and business model canvas: Case study in Lombo Village, Sidrap District. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1230, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
 31. Wahyudi, Fahmid, I. M., Salman, D., & Suhab, S. (2022). Consistency of Central and Regional Planning in the Agricultural Sectors and the Factors Affecting It in Indonesia. *Sustainability*, 14(23), 16297.
 32. Nursini, N. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(1), 270-368.
 33. Alfons, M. E., & Abd Rahman, R. (2024). Government Expenditure, Human Development Index and Regional Inequality in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 4810-4820.
 34. Mangilep, M. A. A., Djam'an, F., Susanti, R., & Mangilep, A. U. A. (2019, August). Sectoral ICORs of South Sulawesi Province. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 713-719). Atlantis Press.
 35. Qalbi, N. R., Indar, I., & Yunus, R. (2020). Attitude of Health Workers to the Utilization of Immigrant Patients Health Services in Tamalanrea Health Center. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(T2), 32-35.
 36. Fitrianti, R., Ismail, M., Maski, G., & Pratomo, D. S. (2015). Does Government

- Expenditure Crowds Out the Private Domestic Investment? Empirical Evidence of Indonesia. *Editorial Board*, 10(5), 35.
37. Aziza, M., Arifin, M. A., Russeng, S. S., Yunus, R., & Al Fajrin, M. (2020). Analysis of Ability and Willingness to Pay Patients in Psychiatric Clinics (Special hospital case study in Maluku Province). *Medico Legal Update*, 20(3), 932-936.
 38. Saru, A. A. A., Arifin, M. A., Darmawansyah, D., Razak, A., Syafar, M., & Rahmatia, R. (2023). Potential fraud and its' prevention in the implementation of national health insurance at Dadi Regional Hospital. *International Journal of Public Health*, 12(3), 1040-1047.
 39. Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153-166.
 40. Paddu, A. H., Reviane, I. T. A., Saudi, N. D. S., Djam'an, F., Zaenal, M., & Sabbar, S. D. (2024). Interlinkages of fiscal decentralization, financial development, and carbon emissions: the underlying significance of natural resources. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), 377-390.
 41. Wati, T. G., Razak, A., & Amir, M. Y. (2024). Analysis of the Inpatient Medical Records Management System at Sandi Karsa Hospital Makassar. *Pharmacognosy Journal*, 16(3).
 42. Paddu, A. H., & Sari Saudi, N. D. (2024). Assessing the implications of imported electricity equipment in Indonesia: A comprehensive ECM approach for short-term and long-term analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 5926.
 43. Zulkifli, A., Noor, N. N., & Riskiyani, S. (2024). Risk Factor Analysis of Stunting in Children Aged 6-23 Months in Tanralili District, Maros Regency, Indonesia. *National Journal of Community Medicine*, 15(07), 559-565.
 44. Syamsuddin, S., Kadir, A. R., & Alam, S. (2024). Leadership in Higher Education in Indonesia: The Case of the University of West Sulawesi. *UCJC Business & Society Review*, (80).
 45. Anwar, A. I., Firianti, R., & Mangilep, M. A. A. (2022). Analysis of financial inclusion and its impact on poverty in South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering*, 7(2), 2568.
 46. Anwar, A. I., Wulandari, N. R. S., & Fitrianti, R. (2020, March). Application of Error Correction Model (ECM) in stabilizing financial inclusion. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012117). IOP Publishing.

47. INDRASWAT, T. A. R. (2017). The Mediating Effect of Inflations on the Effect of Trade Liberalizations and Government Spending Towards Welfare. *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)*, 8(28), 1759-1766.
48. Paddu, A. H., Reviane, I. T. A., Saudi, N. D. S., Djam'an, F., Zaenal, M., & Sabbar, S. D. (2024). Interlinkages of fiscal decentralization, financial development, and carbon emissions: the underlying significance of natural resources. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), 377-390.
49. Saudi, N. D. S., Reviane, I. T. A., Paddu, A. H., Agustin, G., Djam'an, F., & Sabbar, S. D. (2024). Carbon neutrality and sustainable development: an empirical study of Indonesia's renewable energy adoption. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), 526-537.
50. Caroline, A., Rizaldy, A. A., Syahid, M., & Syahwiah, A. (2021, November). Identification of the potential and palm sap characteristics for palm sugar business development in Lombo Village, Sidrap Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 886, No. 1, p. 012055). IOP Publishing.
51. Fitrianti, R., & Siswadharna, B. (2021). THE DETERMINANTS OF CONSUMPTION EXPENDITURE OF FEMALE WORKER IN INFORMAL SECTOR IN MAKASSAR. *Academy of Strategic Management Journal*, 20, 1-8.
52. Syahid, M., & Syahwiah, A. (2021, November). Potential analysis of palm sugar industry development in Lombo Village, Sidrap District. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 886, No. 1, p. 012074). IOP Publishing.
53. Caroline, A., Rizaldy, A. A., Syahid, M., & Syahwiah, A. (2021, November). Identification of the potential and palm sap characteristics for palm sugar business development in Lombo Village, Sidrap Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 886, No. 1, p. 012055). IOP Publishing.
54. Paddu, A. H. (2017). The Influence of Decentralization with Autonomy Power, Decentralization with Authority Power, Factor Mobility, the Construction Cost Index, and Inflation Rate Toward Labor Absorption Rate. Implications toward Regional Inequity in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences (JAES)*, 12(51), 1433-1442.
55. Soedarmono, W. (2023). Revisiting the finance-growth nexus: Global evidence. *Economics Bulletin*, 43(3), 1214-1224.
56. Razak, A. R., Fernandes, A. A. R., & Saifullah, N. I. (2023). Moderation of village funds

- and mediation of agricultural sector growth on poverty in rural areas. *International Journal of Economics and Business Research*, 26(4), 463-483.
57. Iswandi, S., & Yunus, R. (2020, March). The implementation of law number 6 the year 2014 concerning with villages in gender-responsive development planning in Uluere District, Bantaeng Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012091). IOP Publishing.
 58. Anwar, A. I., Nurlita, A., & Fil'ardy, Y. A. K. (2020, March). Impact of credit on agriculture and industrial processing. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
 59. Yunus, A. K. F. A., Mubarak, M. S., & Yunus, A. M. A. (2024). Climate Change and Cyclical Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(5), 125-130.
 60. Anwar, A. I., & Mangilep, M. A. A. (2019, August). The Effects of Economic Growth, Micro Finance Institution, and Micro and Small Enterprises to Income Inequality in South Sulawesi. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 543-546). Atlantis Press.
 61. Sirajuddin, S. N., Nurlaelah, S., Amrawaty, A., Saudi, N. D. S., & Ahmad, A. (2024, October). Pollution levels of pig waste from the bolu animal market in terms of public perception. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3098, No. 1). AIP Publishing.
 62. Yunus, A. K. F. A., Mubarak, M. S., & Yunus, A. M. A. (2024). Climate Change and Cyclical Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(5), 125-130.
 63. Yuliany, N., & Nursini, M. (2022). The Impact of People's Business Credit Program, Minimum Wage, and Investment on Indonesian Poverty. *FWU Journal of Social Sciences*, 16(2), 125-141.
 64. Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Betaubun, S., Lamalewa, F., Kore, E. L. R., & Anwar, A. I. (2020, March). The allocation of special autonomy funds and their impact on regional economic inequality in Papua Province. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
 65. Mangilep, M. A. A., Anwar, A. I., & Mangilep, A. U. A. (2019, August). The Economic Development of Bau-Bau City and the Strengths of its Hinterland. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 616-623). Atlantis Press.

66. Wardihan, F., Wagola, D., & Mangilep, M. A. A. (2021). Businesswomen and the Income Generating Activity in Buton Regency of Indonesia. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(1), 60-66.